



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 – 2026

KECAMATAN JATEN

**Jalan Raya Jaten No. 85, Jaten Telp/
Fax.(0271) 821319,
Www. Jaten.karanganyarkab.go.id
KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JATEN
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dasar penyusunan Renstra OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya kami berharap Perubahan Renstra 2024 - 2026 Kecamatan Jaten yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kecamatan Jaten dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jaten.

Karanganyar, April 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
REGUH HARYONO, SH, M.Si
NIP. 19670210 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.5. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATEN.....	II-1
2.1. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jaten.....	II-1
2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jaten	II-1
2.1.2. Uraian Tugas	II-2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	II-4
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset).....	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
2.3.1. Gambaran Umum Kecamatan Jaten	II-6
2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	II-7
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN JATEN	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan Jaten	III-1
3.2. Penentuan Isu – isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jaten.	IV-1
4.1.1. Tujuan	IV-1
4.1.2. Sasaran	IV-2
4.1.3. Cascading Kinerja Kecamatan Jaten Tahun 2024- 2026.....	IV-5
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jaten	V-1
5.1.1. Strategi Kecamatan Jaten	V-1
5.1.2. Kebijakan.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Jaten Tahun 2019 - 2023	II-4
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Nerdasarkan Golongan di Kecamatan Jaten Tahun 2019 - 2023.....	II-5
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2023	II-6
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022.....	II-8
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022	II-9
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2.	Isu – isu Strategis	III-2
Tabel 4.1.	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten KaranganyarTahun 2024-2026.....	IV-3
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Rancangan Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026	IV-4
Tabel 4.3.	Cascading Kinerja Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026.....	IV-6
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Jaten Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan	II-2
-------------	-------------------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga Perangkat Daerah juga menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025, isu strategis perangkat daerah dan hasil evaluasi capaian pelayanan Perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengatur bahwa pemilu kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak para tahun 2024. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar akan berakhir pada tahun 2023, maka sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut maka Kabupaten Karanganyar berada dalam masa transisi menjelang pemilu kepala daerah tahun 2024 karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir pada tahun 2023. Dengan kondisi tersebut maka perlu disusun dokumen perencanaan dalam masa transisi termasuk penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai upaya mendukung keberlangsungan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam masa transisi menjelang pemilu kepala daerah nasional serentak Tahun 2024 agar pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Karena Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten disusun dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 dengan mempertimbangkan capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2028 - 2023. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman bagi Kecamatan Jaten dalam menjalankan program dan kegiatan selama masa transisi karena adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Jaten untuk tiga tahun kedepan.

Kecamatan Jaten sebagai unit kerja penyelenggara pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu Kecamatan Jaten memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten pada masa transisi tahun 2024 – 2026 agar program dan kegiatan di Kecamatan Jaten tetap berjalan sehingga pembangunan daerah tetap berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas RPJN, RPJMN, Rencana Strategis Kementrian/lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/ lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJPD 2005 -2025 serta RTRW 2023 - 2032. Selanjutnya RPD Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahunan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 -2026 merupakan pengganti kekosongan RPJMD kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang tidak dapat disusun akibat berakhirnya masa jabatan Bupati Karanganyar di tahun 2023 dan belum dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang baru akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Renstra Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar. Renstra Perangkat Daerah akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPD dan RPD yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jaten untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jaten sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaten dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jaten untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jaten.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Jaten, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jaten, kinerja pelayanan Kecamatan Jaten dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jaten.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jaten dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2024 – 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Jaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jaten pada tahun 2024- 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jaten.

BAB II

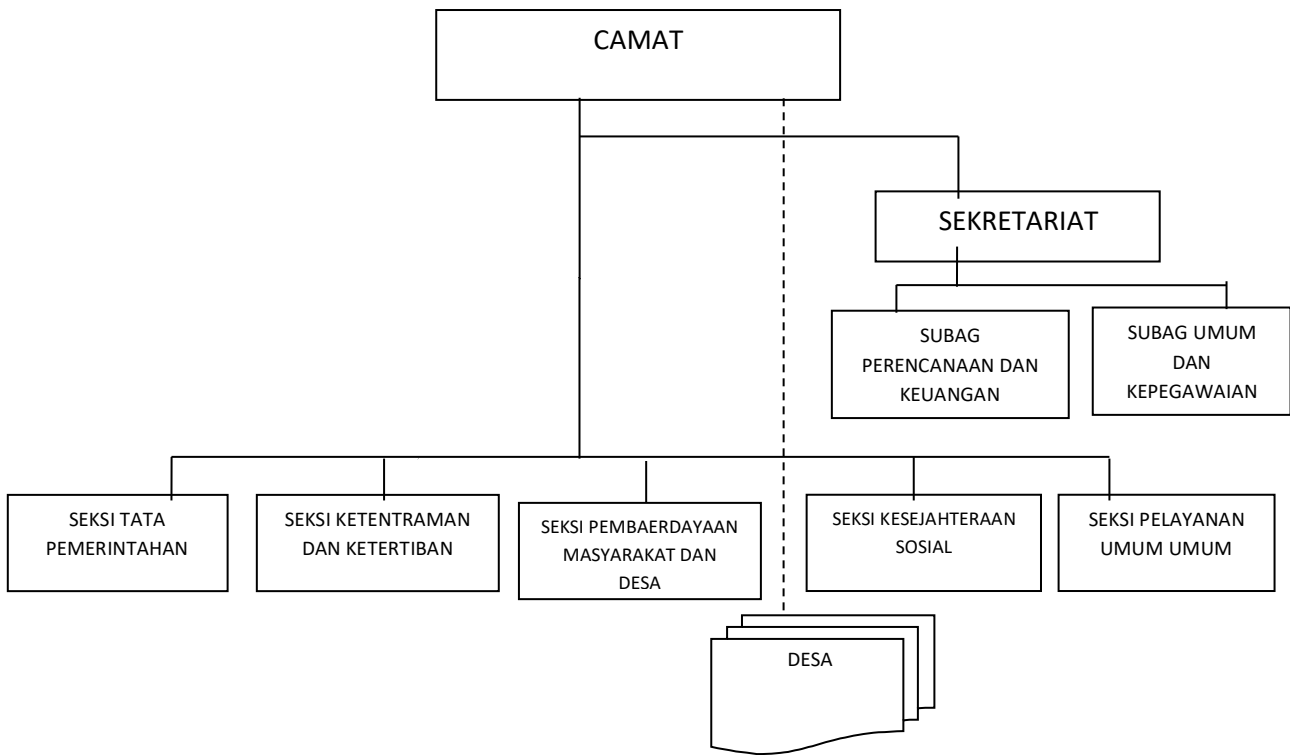
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jaten

Kecamatan Jaten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jaten

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jaten yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jaten berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretarian merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, valuasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan

kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jaten tahun 2023 berjumlah 15 orang yang semuanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini, data pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jaten Tahun 2019 - 2023

No	Tingkat Pendidikan	2019				2020				2021				2022				2023			
		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN		ASN		Non ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	0	0
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	11	7
3	SMA Sederajat	4	0	2	2	4	0	2	2	4	0	2	2	4	0	11	7	4	0	0	1
4	D3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
5	S1	1	4	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	1	3	1	2	0	0
6	S2	3	2	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
Jumlah		10	7	4	0	10	7	4	0	10	7	2	3	10	6	12	10	10	5	12	10

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jaten (2023)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi

institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jaten Tahun 2019 - 2023

No	Golongan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Golongan I	0	0	0	0	0
2	Golongan II	3	3	3	3	2
3	Golongan III	12	12	12	10	9
4	Golongan IV	2	2	2	3	4
Jumlah		17	17	17	16	15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jaten (2023)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja ASN setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Kondisi Barang	Jumlah
1	Baik	529
2	Kurang baik	20
3	Rusak berat	76

Sumber : Kecamatan Jaten (2023)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Gambaran Umum Kecamatan Jaten

A. Keadaan Geografis

1. Letak Geografis

Kecamatan Jaten merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 5 km arah barat. Luas wilayah Kecamatan Jaten adalah 25,55 km² dengan ketinggian rata-rata 110 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Jaten :

- Sebelah Utara : Kec. Kebakkramat
- Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kota Surakarta
- Sebelah Timur : Kec. Tasikmadu dan Kec. Karanganyar

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Jaten adalah 2.554,81 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.212,12 Ha, dan luas tanah kering 1.342,69 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.212,12 Ha, ½ teknis 0,00Ha, sederhana 0,00 Ha dan tadah hujan 0,00 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/ bangunan 1.160,95 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 11,95 Ha dan tanah lainnya 163,66 Ha.

B. Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Jaten terdiri dari 8 desa, 46 dusun, 105 dukuh, 110 RW dan 567 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa semesta dan termasuk desa urban. Desa dengan dusun terbanyak adalah desa Ngringo, yaitu 8 dusun dan yang paling sedikit adalah desa Jati, yaitu 4 dusun. Sedangkan desa dengan jumlah RT terbanyak adalah desa Ngringo yaitu 170 RT dan yang paling sedikit adalah desa Suruhkalang, yaitu 24 RT. Adapun jumlah karangtaruna sebanyak 8, jumlah posyandu 77, jumlah linmas se Kecamatan Jaten 424, jumlah RT 584

dan jumlah RW 114. Jumlah industri yang ada di Kecamatan Jaten sebanyak 778 merupakan industri kecil, industri mikro sebanyak 1,187, industri sedang sebanyak 31 dan industri besar sebanyak 84.

C. Penduduk Dan Tenaga Kerja

1. Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Jaten tahun 2023 sebanyak 75.219 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 37.248 jiwa dan perempuan 37.971 jiwa. Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jaten yang banyak industri, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor industri. Kemudian sebagai buruh tani dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

2. Mata Pencaharian

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jaten yang banyak industri, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor industri. Kemudian sebagai buruh tani dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten

Berdasarkan indikator kinerja Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jaten. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Nilai SAKIP;
- 2) Indek Kepuasan Masyarakat;
- 3) Persentase lembaga kemasyarakatan aktif;
- 4) Persentase wilayah dalam keadaan kondusif;
- 5) Persentase wilayah tertib perda;
- 6) Persentase Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan;

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 - 2022

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2022			Realisasi Capaian Tahun 2021 - 2022		Rasio Capaian Tahun 2021 - 2022	
			2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
1	Nilai SAKIP	Nilai	66	68	70	75,23	75,28	113,89	110,70
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	72	74	75	78,79	80,96	109,43	109,41
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	80	80	85	80	88,89	100	111,11
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	80	80	80	90	87,50	112,5	109,38
5	Persentase wilayah tertib Perda	%	80	80	90	90	87,50	112,5	109,38
6	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	%	90	90	90	90	100	100	111,11

Sumber : Kecamatan Jaten (2023)

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021 – 2022

No	Nama Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Rasio Capaian Terhadap Anggaran (%)		Rata – rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.688.200	2.152.222.050	2.126.696.331	2.083.637.017	97,83	96,81	-0,98	-2,02
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.042.800	44.062.800	5.372.800	40.085.900	88,91	90,97	629,17	608,14
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	5.264.500	-	5.166.500	-	98,14	100	100
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.675.900	183.742.900	58.846.500	176.215.000	93,41	95,90	293,16	199,45
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.649.200	96.835.800	20.742.200	96.428.800	95,82	99,55	347,29	364,89
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.435.900	102.717.200	35.878.900	99.999.200	98,41	97,35	181,91	178,71

Sumber : Kecamatan Jaten (2023)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jaten

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan pengembangan teknologi.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4.2 Peluang

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jaten untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jaten

Kinerja sebuah perangkat daerah terutama Kecamatan Jaten selain dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi. Sumber daya manusia ini harus didukung adanya sarana prasarana kerja yang memadai sebagai alat dalam peningkatan kinerja. Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Jaten sudah diuraikan dalam bab sebelumnya yang disajikan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan 2022.

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan aspek – aspek eksternal lainnya, maka harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jaten ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan, sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing;	1. Seksi Tata Pemerintahan a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2	Masih adanya konflik sosial yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketentraman umum karena belum optimalnya penegakan perda.	c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur; d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparatur pemerintahan kurang;	2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban a. Belum optimalnya sosialisasi Perda; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
3	Masih adanya warga miskin karena belum meratanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa	e. Masih lemahnya	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; f. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; h. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan. i. Belum optimalnya penegakan perda dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketentraman. j. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di desa sehingga masih ada ketimpangan perekonomian di desa.	d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan; c. Masih tingginya tingkat pengangguran; d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. 5. Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana. c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya tata laksana pemerintahan, akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, kedisiplinan ASN dan peningkatan kualitas arsip digital;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah;

3. Masih terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
4. Belum optimalnya kualitas pembangunan desa, pemberdayaan desa, lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan dan pengawasan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten

Tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD (Rancangan Pembangunan Daerah) Kabupaten Karanganyar periode tahun 2024 – 2026. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 berada pada periode tahapan Keempat dari RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap keempat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini yang menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Renstra OPD periode transisi yaitu tahun 2024 – 2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kecamatan Jaten dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.** Adapun indikator dari tujuan ini adalah indeks reformasi birokrasi yang merupakan hasil penilaian penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.** Tolak ukur dari indikator ini adalah angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran Kecamatan Jaten dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam masa transisi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini adalah nilai Sakip OPD yang merupakan hasil penilaian dari inspektorat daerah.

- 2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa.**

Sasaran Kecamatan Jaten ini diukur dengan indikator indeks desa membangun yang diperoleh dari hasil E-IDM Kementrian Desa tingkat kecamatan.

Tabel 4.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026
dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No.	Tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	Tujuan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026	Sasaran Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026
1	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Tujuan 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan desa
		Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan

Sumber : Baperlitbang Kab Kra (2023)

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dalam masa transisi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jaten
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Renstra
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	72	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Na	70	75,33	75,35	75,37	75,37
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan		Angka kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Kondisi Akhir Renstra
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	sosial									
		Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks desa membangun	Indeks	0,7929	0,7931	0,7933	0,7935	0,7937	0,7937

Sumber : Baperlitbang Kab. Kra (2023)

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026

Cascading kinerja Kecamatan Jaten Tahun 2024 – 2026, tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Cascading Kinerja Kecamatan Jaten
Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	6	7
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan yang disediakan
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
				Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas dan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

				Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan				
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDDes yang sesuai ketentuan
				Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa Aset Desa
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : Kecamatan Jaten (2023)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jatèn

5.1.1 Strategi Kecamatan Jatèn

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jatèn adalah :

1. Peningkatan tata laksana pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN dan peningkatan kualitas arsip digital;
2. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
3. Peningkatan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
4. Peningkatan kualitas pembangunan desa melalui peningkatan pemberdayaan desa, lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan dan pengawasan desa.

5.1.2 Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jatèn, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan *Electronic Government (E-Gov)* dan keamanan informasi daerah;

2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
3. Peningkatan pengelolaan arsip digital;
4. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
6. Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;
7. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
8. Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.
9. Peningkatan kualitas produksi pertanian di desa dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri.
10. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan *branding*;
11. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
12. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan desa;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jatèn
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi</p> <p>2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa</p>	<p>1. Peningkatan tata laksana pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN dan peningkatan kualitas arsip digital;</p> <p>2. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah;</p> <p>3. Peningkatan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemandirian dan ketertiban umum;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pembangunan desa melalui peningkatan pemberdayaan desa, lembaga kemasayarakatan</p>	<p>1. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan <i>Electronic Government (E-Gov)</i> dan keamanan informasi daerah;</p> <p>2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan arsip digital;</p> <p>4. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;</p> <p>5. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;</p> <p>6. Peningkatan toleransi,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		desa, pembinaan dan pengawasan desa.	<p>kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;</p> <p>7. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>8. Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.</p> <p>9. Peningkatan kualitas produksi pertanian di desa dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri.</p> <p>10. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan <i>branding</i>;</p> <p>11. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;</p> <p>12. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan desa;</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional.
5. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
 - 6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi					Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Nilai	72		73		75		75			
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD			Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	75,33		75,35		75,37		75,37			Kec Jaten
				UNSUR KEWILAYAHAN				3.470.760.000		3.594.298.000		3.774.012.900		10.839.070.900			
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.470.760.000		3.594.298.000		3.774.012.900		10.839.070.900			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100%	%	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.255.000.000	100	9.355.000.000	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	45.188.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	129.188.000	Kec. Jaten	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	7.126.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	13.126.000	Kec. Jaten	

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	7	38.062.000	7	39.000.000	7	39.000.000	7	116.062.000	Kec. Jaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.977.227.000	14	1.850.000.000	14	1.850.000.000	14	5.677.227.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	14	1.977.227.000	14	1.850.000.000	14	1.850.000.000	14	5.677.227.000	Kec. Jaten	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	116.459.000	12	127.600.000	12	177.600.000	12	421.659.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	12	2.509.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	8.509.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	paket	12	4.615.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	18.615.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan bahan logistik	paket	12	5.790.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	18.790.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	12	7.400.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	24.400.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dokumen	24	2.400.000	24	2.600.000	24	2.600.000	24	7.600.000	Kec. Jaten	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	90.000.000	12	95.000.000	12	145.000.000	12	330.000.000	Kec. Jaten	
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	12	3.745.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	13.745.000	Kec. Jaten	

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	unit	24	686.226.000	28	885.000.000	33	885.000.000	33	2.456.226.000	Kec. Jaten	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan dan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	unit	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	220.000.000	Kec. Jaten	
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	10	31.700.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	81.700.000	Kec. Jaten	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	4	34.526.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	104.526.000	Kec. Jaten	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	350.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.350.000.000	Kec. Jaten	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	700.000.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	69.514.000	12	75.900.000	12	75.900.000	12	221.314.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	900.000	12	900.000	12	900.000	12	2.700.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	12	46.900.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	146.900.000	Kec. Jaten	
				Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	21.714.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	76.714.000	Kec. Jaten	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	105.386.000	12	119.500.000	12	119.500.000	12	344.386.000	Kec. Jaten	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	unit	4	29.071.000	4	34.500.000	4	34.500.000	4	98.071.000	Kec. Jaten	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan mebel	unit	30	5.075.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	25.075.000	Kec. Jaten	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	38	21.240.000	40	25.000.000	40	25.000.000	40	71.240.000	Kec. Jaten	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	Kec. Jaten	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan	nilai	81	33.760.000	81,05	35.448.000	81,1	37.220.400	81,1	106.428.400	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	bulan	12	33.760.000	12	35.448.000	12	37.220.400	12	106.428.400	Kec. Jaten	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan legalisasi dokumen	dokumen	12	33.760.000	12	35.448.000	12	37.220.400	12	106.428.400	Kec. Jaten	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	90	187.000.000	92	196.350.000	93	206.167.500	93	589.517.500	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan	12	187.000.000	12	196.350.000	12	206.167.500	12	589.517.500	Kec. Jaten	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	187.000.000	12	196.350.000	12	206.167.500	12	589.517.500	Kec. Jaten	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100%	%	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	315.250.000	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	bulan	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	315.250.000	Kec. Jaten	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan fasilitasi paskibraka tingkat kecamatan	orang	75	57.000.000	75	60.000.000	75	62.250.000	75	179.250.000	Kec. Jaten	
				Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku, Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional &	orang	200	43.000.000	200	45.000.000	200	48.000.000	200	136.000.000	Kec. Jaten	

						Nasional											
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan					Hasil Pengolahan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)	%	8,52		8,45		8,03		8,03			
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun			Hasil penghitungan indeks sosial, ekonomi dan lingkungan melalui aplikasi E-IDM Kemendes untuk tingkat kecamatan	indeks	0,793 3		0,793 3		0,793 5		0,793 7			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%	%	90	40.000.000	92	42.000.000	93	44.100.000	93	126.100.000	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bulan	12	33.264.500	12	35.000.000	12	36.600.000	12	104.864.500	Kec. Jaten	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	Lembaga	8	8.000.000	8	9.000.000	8	9.600.000	8	26.600.000	Kec. Jaten	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitasi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	8	25.264.500	8	26.000.000	8	27.000.000	8	78.264.500	Kec. Jaten	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	bulan	12	6.735.500	12	7.000.000	12	7.500.000	12	21.235.500	Kec. Jaten	
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	lembaga	2	6.735.500	2	7.000.000	2	7.500.000	2	21.235.500	Kec. Jaten	

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDdes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPBDdes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	%	91	110.000.000	100	115.500.000	100	121.275.000	100	346.775.000	Kec. Jaten	Kec Jaten
				Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	bulan	12	110.000.000	48	115.500.000	40	121.275.000	40	346.775.000	Kec. Jaten	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa	8	53.000.000	8	54.000.000	8	61.275.000	8	168.275.000	Kec. Jaten	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	dokumen	8	5.000.000	8	6.000.000	8	8.000.000	8	19.000.000	Kec. Jaten	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	8	5.000.000	8	6.000.000	8	8.000.000	8	19.000.000	Kec. Jaten	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangcam	Dokumen	8	7.000.000	8	7.500.000	8	9.000.000	8	23.500.000	Kec. Jaten	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	dokumen	8	30.000.000	8	31.000.000	8	35.000.000	8	96.000.000	Kec. Jaten	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	8	10.000.000	8	11.000.000	0	-	8	21.000.000	Kec. Jaten	

Sumber : Baperlitbang Kab Kra, Kecamatan Jaten (2023)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan sasaran Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026 ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target Capaian Tahun			Target Akhir
			Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	72	73	75	75
2	Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
3	Nilai SAKIP	Nilai	Na	70	75,33	75,35	75,37	75,37
4	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7929	0,7931	0,7933	0,7935	0,7937	0,7937

Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar (2023)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program pada Renstra Kecamatan Jaten Tahun 2024-2026

No	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun			Target Akhir
				2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	81,05	81,1	81,1
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	90	92	93	93
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	90	92	93	93
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDDes yang sesuai ketentuan	%	91	100	100	100

Sumber : Baperlitbang Kab. Karanganyar (2023)

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 untuk mengisi kekosongan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar yang telah selesai masa berlakunya sampai dengan dipilihnya Kepala Daerah yang baru. Penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2018-2022 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jaten tahun 2024 -2026 merupakan Renstra dalam masa transisi kekosongan pimpinan daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jaten.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2024 -2026, telah selesai disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jaten sebelum adanya RPJMD Kabupaten Karanganyar yang baru.
6. Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jaten sehingga masing-masing dapat mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

